



RENJA BKPSDM

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TAHUN 2026



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**JL. SKB Kel. Sungai Beringin Kec. Tembilahan
TEMBILAHAN**

KATA PENGANTAR



Atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya semata kepada kita semua, sehingga Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 dapat terselesaikan dengan baik.

Tujuan disusunnya Rancangan Akhir Renja Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir adalah untuk menggambarkan menyeluruh tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra serta Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan waktu, dana serta kemampuan yang tersedia. Untuk itu saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan dari pembaca. Tidak lupa ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan RENJA ini.

Akhirnya kami berharap semoga RENJA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 ini nantinya dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir kedepan.

Tembilahan, Desember 2025

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Indragiri Hilir,

Agustia Nugroho, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 198108142011021001

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-11
2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah	II-16
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II-20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-28

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	III-4
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	III-5

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

IV-1

BAB V PENUTUP.....

V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	II-2
Tabel 2.2	Kinerja Penyelenggaraan Urusan BKPSDM 2024-2026	II-11
Tabel 2.4	Kinerja Indikator Kinerja Kunci BKPSDM 2024-2026	II-15
Tabel 2.5	Perumusan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II-18
Tabel 2.6	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 BKPSDM Kabupaten Indragiri Hilir	II-21
Tabel 2.7	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026	II-28
Tabel 3.1	Prioritas dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2026	III-1
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran BKPSDM Tahun 2026	III-5
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	III-7
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	IV-1



DAFTAR GAMBAR

Tabel 1.1 Hubungan Antara Renja-PD dengan Dokumen Perencanaan lainnya I-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

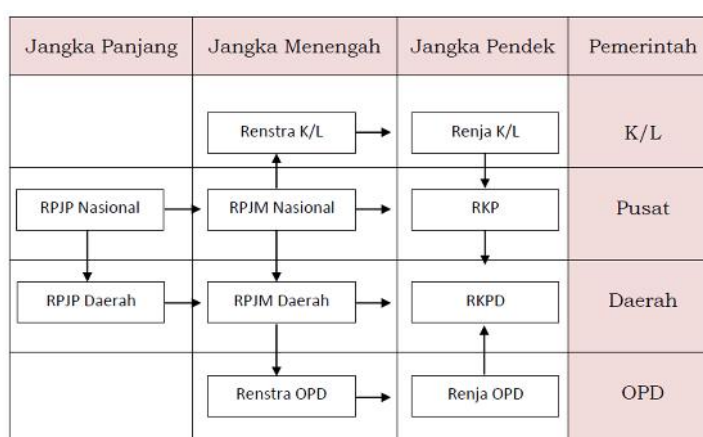
Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2026 ini merupakan instrumen penting dan dokumen perencanaan tahunan yang bersifat operasional. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi (Nama Perangkat Daerah).

Penyusunan Renja ini memiliki kedudukan strategis sebagai penjabaran tahunan dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah [Nama Perangkat Daerah] periode 2025-2029 dan merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026.

Renja-PD ini disusun sebagai panduan kerja tahunan Perangkat Daerah dan telah melalui serangkaian proses penyusunan diantaranya (1) Persiapan Penyusunan, (2) Penyusunan Rancangan Awal, (3) Penyusunan Rancangan, (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, serta (5) Perumusan Rancangan Akhir.

Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan tingkat Perangkat Daerah dengan perencanaan yang lebih luas, yaitu keterkaitan antara Renja-PD dengan dokumen Renstra-PD, dengan Renja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), dan Renja provinsi/kabupaten/kota terkait.

Gambar 1.1
Hubungan Antara Renja-PD dengan Dokumen Perencanaan lainnya



Melalui dokumen ini, diharapkan seluruh sumber daya, program, kegiatan, dan subkegiatan dapat diarahkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) [Nama Perangkat Daerah] Tahun [Tahun Perencanaan] didasarkan pada peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1419)
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
 - 10) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 11) Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026;
 - 12) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 Nomor 8);
 - 13) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
 - 14) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 Nomor 5);
 - 15) Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organsasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 70);
 - 16) Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Darah Tahun 2025-2029;
 - 17) Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 59 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja-PD adalah menyediakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang definitif dan final, yang menjadi pedoman operasional dan alat pengendalian bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta sebagai dasar penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Sementara tujuan penyusunan Renja-PD ini adalah sebagai berikut :

- 1) Menjabarkan dan menterjemahkan sasaran dan indikator kinerja Renstra Perangkat Daerah ke dalam rencana program, kegiatan, dan subkegiatan tahunan yang lebih terperinci.
- 2) Memastikan keselarasan (koordinasi dan konsistensi) antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan RKPD Tahun 2026.
- 3) Menyediakan tolok ukur kinerja tahunan dalam rangka mencapai sasaran strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra-PD.
- 4) Menjamin ketersediaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang efektif dan efisien untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menyajikan identifikasi dan analisis mendalam terhadap isu-isu krusial yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk menghasilkan rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses peninjauan ulang (review) yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk memastikan bahwa usulan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirumuskan oleh Perangkat Daerah telah selaras dengan arah dan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rancangan Awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan hasil kajian yang dilakukan Perangkat Daerah terhadap usulan program/kegiatan yang diajukan oleh berbagai pemangku kepentingan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Uraian penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Menyajikan penjelasan naratif mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada tahun perencanaan untuk memberikan konteks dan justifikasi terhadap rumusan program dan kegiatan yang diusulkan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program, kegiatan, dan sub-kegiatan beserta indikator kinerja dan alokasi pendanaan tahun 2026.

BAB V. PENUTUP

Menyajikan uraian penutup, berupa catatan penting, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menetapkan landasan analitis bagi perumusan rencana kerja tahun berjalan dengan menyajikan hasil evaluasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembanagn Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun sebelumnya (2024) dan tahun berjalan (2025). Proses evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, mengidentifikasi isu-isu kritis, serta merumuskan rekomendasi strategis yang mengarahkan perencanaan tahun 2026.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sub Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2025, yang mengacu pada APBD tahun berjalan. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah mengaitkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah. Review hasil evaluasi ini mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Untuk menetapkan landasan data yang kuat terhadap perumusan isu-isu penting, [Nama Perangkat Daerah] menyajikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024) dan Perkiraan Capaian Kinerja hingga Tahun Berjalan (Tahun 2025). Evaluasi ini mengukur secara terperinci tingkat keberhasilan setiap Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah, serta menghitung persentase pencapaian terhadap target Renstra. Hasil komparasi ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi kesenjangan kinerja (performance gap) yang akan dianalisis lebih lanjut pada subbab berikutnya.

Tabel berikut menampilkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan) :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatn (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Su b Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja-PD tahun (2024)	Realisas i Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 7/6*100)	(9)	(10 = 5 + 7 + 9)	(11 = 10/4*100)	
5.03.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA											
5.03.01.2.01		1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan Kinerja dan pelaporan kinerja yang disusun Sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)								
5.03.01.2.01.01			1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	15		5	5	100	5	10	66,67
5.03.01.2.01.07			1.1.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan Laporan)	18		6	6	100	6	12	66,67

5.03.01.2.02		1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)								
5.03.01.2.02.01		1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji Tunjangan ASN (Dengan Satuan Orang/Bulan)	43		40	40	100	40	40	93,02
5.03.01.2.05		1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti Sosialisasi dalam rangka Pengembangan Kompetensi (Dengan Satuan:Persen)								
5.03.01.2.05.07		1.3.1	Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Dengan Satuan:Laporan)	6		2	2	100	4	6	100,00
5.03.01.2.05.10		1.3.2	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	750		250	250	100	100	350	46,67
5.03.01.2.06		1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Persen)								
5.03.01.2.06.01		1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12		4	4	100,00	1	5	41,67
5.03.01.2.06.02		1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan:Paket)	30		10	10	100	4	14	46,67
5.03.01.2.06.04		1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	48		18	18	100	3	21	43,75

5.03.01.2.06.05		1.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	18		6	6	100	6	12	66,67
5.03.01.2.06.06		1.4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	3		1	1	100	12	2	66,67
5.03.01.2.06.09		1.4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12		4	4	100	12	16	133,33
5.03.01.2.07		1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)								
5.03.01.2.07.02		1.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan (Dengan Satuan:Unit)	3		0	0	0	0	0	0,00
5.03.01.2.08		1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional Kantor (Dengan Satuan:Persen)								
5.03.01.2.08.01		1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	6		2	2	100	2	4	66,67
5.03.01.2.08.02		1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	6		2	2	100	2	4	66,67
5.03.01.2.08.04		1.6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	6		2	2	100	2	4	66,67
5.03.01.2.09		1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik (Dengan Satuan:Persen)								

5.03.01.2.09.02		1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	102		35	35	100	35	70	68,63
5.03.01.2.09.06		1.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	138		48	48	100	35	83	60,14
5.03.01.2.09.09		1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	3		1	0	0	1	1	33,33
5.03.02	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH										
5.03.02.2.01		2.1	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN yang diangkat melalui Seleksi Pengadaan ASN (Dengan Satuan:Person)								
5.03.02.2.01.04		2.1.1	Sub Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN (Dengan Satuan:Laporan)	6		2	2	100	2	4	66,67
5.03.02.2.01.06		2.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dengan Satuan:Dokumen)	6		2	2	100	2	4	66,67
5.03.02.2.01.08		2.1.3	Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Dengan Satuan:Lembaga)	3		1	1	100	1	2	66,67
5.03.02.2.01.11		2.1.4	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	6		2	2	100	2	4	66,67
5.03.02.2.01.12		2.1.5	Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Laporan)	6		2	2	100	2	4	66,67

5.03.02.2.02		2.2	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase aparatur yang menjabat sesuai dengan syarat kompetensi jabatannya (Dengan Satuan:Persen)								
5.03.02.2.02.01			2.2.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	6		2	2	100	2	4	66,67
5.03.02.2.02.02			2.2.2 Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	6		2	2	100	6	8	133,33
5.03.02.2.03		2.3	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN (Dengan Satuan:Persen)								
5.03.02.2.03.01			2.3.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	380		150	150	100	110	260	68,42
5.03.02.2.03.04			2.3.2 Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Dengan Satuan:Orang)	390		150	150	100	100	250	64,10
5.03.02.2.04		2.4	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang memiliki Kinerja Baik (Dengan Satuan:Persen)								
5.03.02.2.04.02			2.4.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dengan Satuan:Dokumen)	6		2	2	100	2	4	66,67
5.03.02.2.04.04			2.4.2 Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Dengan Satuan:Orang)	700		260	255	98,08	210	465	66,43
5.03.02.2.04.08			2.4.3 Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Dengan Satuan:Laporan)	12		4	4	100	3	7	58,33

5.04.02	3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA											
5.04.02.2.01		3.1	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Dengan Satuan:Persen)								
5.04.02.2.01.03			3.1.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Dengan Satuan:Orang)	48		20	16	100	12	28	58,33
5.04.02.2.02		3.2	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Dengan Satuan:Persen)								
5.04.02.2.02.07			3.2.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Dengan Satuan:Laporan)	12		4	4	100	2	6	50,00

Berdasarkan tabel diatas, pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan menunjukkan dinamika capaian kinerja yang bervariasi. Setiap indikator memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda, dipengaruhi oleh karakteristik kegiatan, kondisi sumber daya, serta faktor teknis maupun nonteknis di lapangan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian indikator mampu direalisasikan sesuai target, bahkan bisa terdapat indikator yang melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat indikator yang belum mencapai target sehingga memerlukan analisis lebih lanjut terhadap penyebab dan langkah tindak lanjutnya.

Berikut ini disajikan uraian capaian kinerja yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu :

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota dengan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yaitu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dimana target kinerja yang ingin di capai adalah 1 unit namun tidak dapat dilaksanakan. Ini disebabkan oleh adanya rasionalisasi terhadap anggaran pada sub kegiatan tersebut.

2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota, Program Kepegawaian Daerah serta Program Pendidikan dan Pelatihan telah memenuhi target kinerja. Begitu juga kegiatan-kegiatan yang ada dalam program tersebut meskipun ada 1 sub kegiatan yang belum memnuhi target akibat adanya rasionalisasi anggaran sehingga tidak dapat dilaksanakan tetapi secara umum pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja

Pada Program Kepegawaian Daerah dengan Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN terdapat Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja yaitu ada Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dimana target kinerja yang ingin di capai adalah 2 dokumen dengan realisasi 6 dokumen. Ini disebabkan karena adanya perubahan regulasi terhadap pengelolaan kenaikan pangkat ASN 6 kali dalam 1 tahun.

Pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan dalam Renja tahun berjalan memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra. Capaian kinerja tahunan menjadi fondasi dan akumulasi capaian yang menentukan sejauh mana sasaran strategis lima tahunan dapat direalisasikan.

Secara umum, realisasi kinerja yang sesuai atau mendekati target Renja akan memberikan dampak positif berupa:

1. Percepatan pencapaian sasaran Renstra, karena setiap capaian tahunan menjadi bagian dari progres kumulatif lima tahun.
2. Peningkatan efektivitas pelaksanaan program melalui konsistensi pencapaian output dan outcome tahunan.
3. Mengurangi beban pencapaian pada tahun-tahun berikutnya, terutama untuk indikator yang bersifat bertahap atau berkesinambungan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kontribusi terhadap isu-isu strategis dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

Namun demikian, apabila terdapat kegiatan atau subkegiatan tertentu yang belum mencapai target tahunan, kondisi ini dapat menimbulkan konsekuensi terhadap pencapaian Renstra, antara lain :

1. Berkurangnya capaian kumulatif terhadap indikator kinerja Renstra, sehingga membutuhkan akselerasi pada tahun berikutnya.
2. Penyesuaian strategi dan alokasi sumber daya, karena ketertinggalan capaian menuntut intervensi yang lebih intensif.
3. Risiko tidak tercapainya target lima tahunan, apabila ketidaktercapaian renja bersifat berulang atau terkait faktor-faktor eksternal yang signifikan.
4. Penurunan efektivitas program, terutama bila subkegiatan yang tidak tercapai merupakan komponen kunci dari rantai kinerja.

Untuk mengatasi berbagai faktor penyebab ketidaktercapaian target kinerja pada tingkat program/kegiatan/subkegiatan, diperlukan sejumlah kebijakan dan langkah strategis dalam proses perencanaan maupun penganggaran. Tindakan ini bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan Renja pada tahun-tahun berikutnya dapat kembali berada pada jalur pencapaian sasaran Renstra. Kebijakan dan langkah strategis yang dapat diambil antara lain :

1. Penguatan Perencanaan Berbasis Kinerja

Melakukan penyempurnaan perumusan indikator, target, dan tolok ukur kinerja agar lebih realistis dan selaras dengan kondisi riil, termasuk penajaman analisis kebutuhan dan prioritas kegiatan sesuai arah kebijakan Renstra.

2. Penyesuaian Prioritas Program dan Kegiatan

Mengarahkan alokasi sumber daya pada kegiatan yang memiliki kontribusi langsung terhadap capaian indikator Renstra, terutama kegiatan/subkegiatan yang sebelumnya tidak mencapai target namun bersifat strategis.

3. Penguatan Koordinasi Antar-Unit/Stakeholder

Membangun mekanisme koordinasi yang lebih intensif antarunit pelaksana, mitra kerja, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi hambatan teknis maupun administratif yang berpengaruh pada capaian kinerja.

4. Peningkatan Kualitas Penganggaran

Melakukan penajaman pagu anggaran berbasis prioritas, memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki kecukupan pendanaan, serta menghilangkan output yang tidak mendukung capaian sasaran strategis.

5. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Berkala

Mengintensifkan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan revaluasi kinerja secara triwulanan agar potensi keterlambatan atau ketidaktercapaian dapat diidentifikasi lebih dini dan segera ditindaklanjuti.

6. Penguatan Kapasitas Pelaksana Program

Memberikan dukungan peningkatan kompetensi, bimbingan teknis, atau asistensi kepada pelaksana kegiatan agar kemampuan perencanaan, pelaporan, dan eksekusi program semakin optimal.

7. Perbaikan Proses Pelaksanaan dan Administrasi

Menyederhanakan prosedur pengadaan, memperbaiki perencanaan waktu pelaksanaan, serta meningkatkan efisiensi proses agar tidak terjadi keterlambatan yang berdampak pada capaian output.

8. Revisi Strategi Pelaksanaan pada Kegiatan yang Tidak Tercapai

Melakukan revisi pendekatan, metode kerja, atau model intervensi pada subkegiatan yang tidak tercapai, termasuk mengadopsi inovasi untuk mempercepat realisasi pada tahun berikutnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sub-bab ini menyajikan analisis terhadap capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan perkembangan data selama periode 2020–2024. Analisis dilakukan untuk melihat dinamika kinerja dari tahun ke tahun, mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, serta menilai sejauh mana kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Hasil evaluasi ini menjadi landasan dalam merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan pada tahun berikutnya agar lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Analisis kinerja ini dilakukan terhadap pencapaian kinerja dari sisi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan

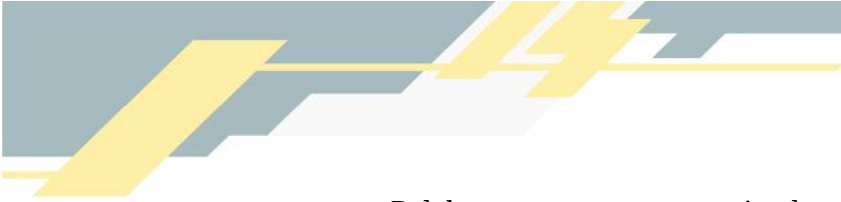
Pada bagian ini disajikan evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah dalam periode 2024–2026. Analisis mencakup perkembangan indikator urusan, pencapaian target tahunan, serta konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang diperoleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu, bagian ini juga menyoroti faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi fluktuasi kinerja selama lima tahun terakhir, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas penyelenggaraan urusan perangkat daerah.

Tabel 2.2
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026

No	Indikator	Target Renstra PD			Realisasi Capaian		Proyeksi
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)
	Nilai Evaluasi RB BKPSDM Kab. Inhil atas Komponen Pengungkit	34,34	34,35	34,36	NA	NA	-
	Nilai AKIP BKPSDM	66,10	66,25	66,80	70,60	70,80	71,00
1	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100	100
1.1	Persentase Perencanaan Kinerja dan pelaporan kinerja yang disusun Sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100	100

1.1.1		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	5	5	5	5
1.1.2		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan Laporan)	5	6	6	5	6	6
1.2		Perangkat Daerah Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100	100
1.2.1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji Tunjangan ASN (Dengan Satuan Orang/Bulan)	40	45	45	40	45	45
1.3		Persentase ASN yang mengikuti Sosialisasi dalam rangka Pengembangan Kompetensi (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100	100
1.3.1		Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2	2	2	2
1.3.2		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	250	250	250	250	100	0
1.4		Persentase Sarana Prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100	100
1.4.1		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	4	4	1	1
1.4.2		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan:Paket)	10	10	10	10	1	12
1.4.3		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	16	16	14	18	3	12
1.4.4		Jumlah Paket Barang Cetak danPenggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	6	6	6	6	8	12
1.4.5		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1	1	2	0
1.4.6		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	4	4	4	12	12
1.5		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	0	0	0
1.5.1		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan (Dengan Stuan:Unit)	1	1	1	0	0	0
1.6		Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional Kantor (Dengan Stuan:Persen)	100	100	100	100	100	100
1.6.1		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2	2	2	2
1.6.2		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2	2	2	2
1.6.3		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2	2	2	2
1.7		Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100	100
1.7.1		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	35	34	33	35	35	38
1.7.2		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	48	46	44	48	35	35
1.7.3		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1	0	0	1
Indeks Profesionalitas ASN			58,10	58,12	58,15	74,04	79,59	79,9

		Indeks Sistem Merit	281,5	290,5	291	311	NA	-
2		Persentase Peningkatan Profesionalitas ASN (Dengan Satuan:Person)	100	100	100	100	100	100
2.1		Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN yang diangkat melalui Seleksi Pengadaan ASN (Dengan Satuan:Person)	100	100	100	100	100	100
2.1.1		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2	2	2	1
2.1.2		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2	2	2	175
2.1.3		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Dengan Satuan:Lembaga)	1	1	1	1	1	2
2.1.4		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2	2	2	0
2.1.5		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2	2	2	0
2.2		Persentase aparatur yang menjabat sesuai dengan syarat kompetensi jabatannya (Dengan Satuan:Person)	80	80	80	80	80	80
2.2.1		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2	2	2	2
2.2.2		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2	2	6	12
2.3		Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Kopetensi ASN (Dengan Satuan:Person)	48	48	48	48	48	48
2.3.1		Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	150	120	110	150	148	78
2.3.2		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Dengan Satuan:Orang)	150	130	110	150	1	2
2.4		Persentase ASN yang memiliki Kinerja Baik (Dengan Satuan:Person)	100	100	100	100	100	100
2.4.1		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2	2	2	3
2.4.2		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Dengan Satuan:Orang)	260	230	210	255	250	270
2.4.3		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	4	4	2	1
3		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Person)	52	53	54	52	53	54
3.1		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Dengan Satuan:Person)	80	80	80	80	80	80
3.1.1		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Dengan Satuan:Orang)	20	16	12	16	1	10
3.2		Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (Dengan Satuan:Person)	40	40	40	40	40	40
3.2.1		Jumlah CPNS yang terfasilitasi mengikuti Diklat Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	4	4	2	2



Pelaksanaan urusan pemerintahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2024–2026 menunjukkan capaian kinerja yang beragam. Secara umum, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mampu melaksanakan sebagian besar program dan kegiatan sesuai arah kebijakan pembangunan daerah, meskipun terdapat indikator yang memerlukan perhatian khusus.

Pada indikator kinerja utama, capaian kinerja menunjukkan hasil tinggi dan bahkan melampaui target. Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas ASN tercapai dengan angka 74,04 pada tahun 2024 dan angka sementara pada tahun 2025 mencapai 79,59 dari target yang ditetapkan. Sementara Indeks Sistem Merit dengan target tahun 2024 pada renstra 281,5 tercapai 311. Hal ini terlihat dari meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian, penyelesaian proses manajemen ASN yang lebih cepat dan akurat, serta pelaksanaan program pengembangan kompetensi yang memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas aparatur. Keberhasilan ini merupakan hasil dari optimalisasi sumber daya, peningkatan koordinasi lintas unit, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola kepegawaian.

Namun demikian, masih terdapat indikator subkegiatan yang menunjukkan capaian rendah atau belum memenuhi target seperti Indikator pada subkegiatan Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan subkegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Keterbatasan anggaran maupun dinamika perubahan regulasi menjadi faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut.

Variasi capaian ini memberikan gambaran bahwa secara umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah berada pada jalur yang tepat dalam penyelenggaraan urusan kepegawaian, namun tetap membutuhkan strategi perbaikan untuk memastikan konsistensi pencapaian target pada seluruh indikator. Melalui penyempurnaan perencanaan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan kualitas layanan berbasis kinerja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan mampu mencapai target pembangunan jangka menengah serta meningkatkan profesionalisme ASN secara berkelanjutan

B. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bagian ini menjelaskan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama periode 2024–2026 sebagai ukuran utama keberhasilan perangkat daerah dalam mendukung sasaran pembangunan daerah. Analisis fokus pada pencapaian target, tren perkembangan kinerja, konsistensi output dan outcome yang dihasilkan, serta kontribusi IKK terhadap pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Evaluasi ini memberikan gambaran sejauh mana kinerja perangkat daerah mengalami peningkatan, stagnasi, atau penurunan selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.4
Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra PD			Realisasi Capaian		Proyeksi
		2024	2025	2026	2024	2025*	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (Tidak termasuk guru & nakes)	240,85	65,52	70,28	70,22	70,22	70,28
2.	Rasio Pegawai PNS Fungsional (Tidak termasuk guru & nakes)	20,64	22,36	24,01	21,41	21,41	24,01
3.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	2,68	18,26	18,47	18,26	18,26	18,47

Secara umum, capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan kinerja yang relatif baik dan konsisten. Pada tahun 2024, realisasi seluruh indikator telah memenuhi bahkan melampaui target Renstra PD, serta diproyeksikan dapat dipertahankan hingga tahun 2026. Hal ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam peningkatan kualitas dan penataan sumber daya aparatur secara bertahap dan terarah.

Realisasi tahun 2024 telah melampaui target, menunjukkan komposisi tingkat pendidikan ASN yang semakin proporsional. Kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas pendidikan ASN, baik melalui rekrutmen maupun pengembangan kompetensi. Proyeksi capaian hingga 2026 relatif stabil, yang menandakan kebijakan pengelolaan ASN telah berjalan konsisten dan berkelanjutan.

Capaian indikator ini menunjukkan tren peningkatan positif dan telah melampaui target tahun 2024. Hal ini mengindikasikan keberhasilan kebijakan penguatan jabatan fungsional sebagai tulang punggung kinerja organisasi. Peningkatan rasio ini juga mencerminkan pergeseran ASN ke arah jabatan yang lebih profesional, spesifik, dan berbasis keahlian.

Realisasi indikator ini jauh melampaui target Renstra 2024, menunjukkan keberhasilan signifikan dalam peningkatan sertifikasi kompetensi ASN fungsional. Capaian ini menegaskan komitmen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mendorong profesionalisme ASN melalui uji kompetensi dan sertifikasi. Proyeksi hingga 2026 menunjukkan upaya konsolidasi dan pemeliharaan kualitas kompetensi ASN.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sub-bab ini memaparkan identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis yang muncul dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai dasar penyusunan rancangan program, kegiatan, dan sub-kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Permasalahan dan Isu strategis diidentifikasi berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja 2020–2024, analisis hambatan operasional, serta keterkaitannya dengan target pembangunan daerah dan nasional.

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum, capaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada periode 2024–2026 menunjukkan peningkatan pada beberapa indikator seperti Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN adalah 74,04 dari target yang ditetapkan pada renstra yaitu 58,10 dan capaian sementara pada tahun 2025 sudah mencapai 79,59. Sementara untuk Indeks Sistem Merit pada tahun 2024 telah tercapai 311 dari target 281,5. Namun, terdapat sejumlah

aspek kritis yang memerlukan perhatian intensif untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan layanan. Hal kritis tersebut mencakup:

- 1) Peningkatan kompetensi ASN, khususnya teknis, manajerial, dan digital.
- 2) Pemetaan dan penataan ASN berbasis kebutuhan riil (Anjab dan ABK).
- 3) Penguatan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi dan berbasis data.
- 4) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses kerja dan layanan.
- 5) Pemerataan distribusi ASN, terutama pada unit layanan dan wilayah prioritas.
- 6) Penguatan koordinasi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah.
- 7) Penyediaan infrastruktur dan dukungan anggaran yang memadai.
- 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indragiri Hilir menghadapi sejumlah permasalahan yang memengaruhi efektivitas kinerja perangkat daerah. Berdasarkan analisis terhadap gambaran pelayanan, capaian kinerja (IKU, IKK, SPM), serta kondisi sumber daya yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, dan dengan mengacu pada permasalahan pembangunan daerah yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 sesuai tupoksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu " penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia" maka dapat dirumuskan Permasalahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah “Belum Optimalnya Manajemen Aparatur Sipil Negara”.

Untuk merangkum dan memetakan permasalahan pelayanan yang telah diuraikan secara naratif di atas, berikut disajikan Tabel Perumusan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perumusan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Belum Optimalnya Manajemen Aparatur Sipil Negara	Kompetensi Teknis dan Manajerial ASN belum optimal sehingga IP ASN Inhil masih kategori sedang	1. Belum adanya pemetaan kompetensi ASN yang komprehensif dan diperbarui secara berkala 2. Rendahnya frekuensi dan kualitas pelatihan teknis dan manajerial
		Rendahnya pemanfaatan potensi daerah sebagai basis pengembangan kompetensi ASN	1. Belum optimalnya kemitraan dengan lembaga diklat regional dan nasional 2. Keterbatasan anggaran dan sumberdaya pelatihan
		Distribusi ASN belum merata dan belum sepenuhnya sesuai dengan Anjab dan ABK	1. Pemutakhiran data anjab dan ABK belum sepenuhnya dilakukan secara berkala dan menyeluruh 2. Belum optimalnya koordinasi antara BKPSDM dengan PD terkait kebutuhan riil pegawai 3. Belum optimalnya sistem monitoring distribusi ASN bebrabsis data 4. Faktor geografis dan minat ASN bekerja diwilayah terpencil rendah
		Sistem Manajemen Kinerja yang belum terintegrasi secara optimal	1. Insfratraktur teknologi informasi belum merata dan memadai diseluruh PD terutama diwilayah kecamatan 2. Kurangnya literasi didgital dan pemahaman teknis sebagian ASN terhadap sistem e-kinerja

Permasalahan tersebut diatas secara langsung memengaruhi efektivitas pencapaian visi dan misi kepala daerah, terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif yang berkesinambungan. Dampak yang timbul antara lain:

- 1) Kinerja ASN belum optimal dan belum merata.
- 2) Pengembangan kompetensi ASN kurang tepat sasaran.
- 3) Distribusi ASN tidak seimbang dengan kebutuhan organisasi.
- 4) Sistem manajemen dan penilaian kinerja belum efektif.
- 5) Kualitas pelayanan publik belum maksimal dan tidak merata

Meskipun berbagai permasalahan telah teridentifikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dinamika tersebut tidak berdiri sendiri. Setiap hambatan yang muncul pada dasarnya mencerminkan adanya kesenjangan antara kapasitas kelembagaan saat ini dengan tuntutan pembangunan daerah yang terus berkembang. Dalam kerangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, kondisi ini menuntut Perangkat Daerah untuk tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang bersifat operasional, tetapi juga mampu membaca arah perubahan lingkungan strategis yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Berikut dijabarkan tantangan yang berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan, serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong inovasi dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah :

Tantangan :

- 1) Kompetensi teknis dan manajerial ASN belum merata.
- 2) Pemetaan kebutuhan dan pengembangan ASN belum sepenuhnya berbasis data.
- 3) Distribusi ASN belum seimbang dengan beban kerja dan kebutuhan riil.
- 4) Keterbatasan anggaran pengembangan SDM dan infrastruktur pendukung.
- 5) Integrasi sistem manajemen kinerja dan digitalisasi belum optimal.
- 6) Koordinasi lintas Perangkat Daerah masih perlu diperkuat.

Peluang :

- 1) Penerapan sistem manajemen ASN berbasis digital dan data terintegrasi.
- 2) Pemanfaatan kerja sama dengan lembaga pelatihan regional dan nasional.
- 3) Optimalisasi potensi lokal sebagai dasar pengembangan kompetensi ASN.
- 4) Reformasi birokrasi dan kebijakan nasional sebagai pengungkit peningkatan kinerja.
- 5) Penguatan budaya kinerja, inovasi, dan pembelajaran berkelanjutan.
- 6) Peningkatan kolaborasi antar Perangkat Daerah untuk efisiensi dan inovasi layanan

2.3.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembanagn Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal, serta perumusan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan isu Strategis pada Badan Kepegawaian dan Pengembanagn Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

- 1) Masih terbatasnya Pengembangan kompetensi teknis dan manajerial ASN, meskipun tersedia potensi ASN yang cukup besar, sehingga IP ASN belum optimal
- 2) Belum optimalnya kemitraan dan kolaborasi BKPSDM dengan lembaga diklat daerah dan regional dalam pengembangan kompetensi ASN
- 3) Belum meratanya distribusi ASN antar Unit Kerja dan Wilayah serta belum optimalnya penempatan ASN yang sesuai dengan hasil Anjan dan ABK, meskipun tersedia jumlah SDM yang cukup besar sehingga berdampak pada ketidakseimbangan beban kerja dan efektifitas pelayanan publik.
- 4) Belum Optimalnya integrasi dan pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian berbasis digital untuk mendukung Manajemen ASN yang transparan, efisienw dan akuntabel.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Subbab ini membahas hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD, yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara usulan program/kegiatan Perangkat Daerah dengan hasil analisis kebutuhan aktual. Review ini menjadi bagian penting dalam menjamin bahwa perencanaan tahunan mampu menjawab isu strategis, kebutuhan pelayanan, serta target pembangunan daerah secara lebih tepat dan terukur.

Proses review dilakukan dengan membandingkan rumusan program, indikator, target, lokasi, dan pagu indikatif yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dengan kebutuhan riil yang diidentifikasi melalui analisis kinerja, capaian urusan, serta dinamika isu pembangunan daerah. Dari proses ini diperoleh temuan-temuan penting yang menjadi dasar penyempurnaan perencanaan, termasuk identifikasi ketidaksesuaian, kekurangan informasi, kebutuhan penyesuaian pagu, maupun kebutuhan penambahan/rasionalisasi program dan kegiatan. Melalui review ini diharapkan Rancangan Awal RKPD dapat diselaraskan dengan kebutuhan aktual serta lebih responsif terhadap perubahan dan tantangan pembangunan daerah.

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai hasil review tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembanagn Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir menyajikan perbandingan usulan program, kegiatan, indikator, target, dan kebutuhan pendanaan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan internal Perangkat Daerah sbagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026

Badan Kepegawaian dan Pengembanagn Sumber Daya Manusia

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	BKPSDM-Tembilahan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	6.523.472.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	BKPSDM-Tembilahan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	6.033.787.900	
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM-Tembilahan	Persentase Perencanaan Kinerja dan pelaporan kinerja yang disusun Sesuai standar	100	36.627.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM-Tembilahan	Persentase Perencanaan Kinerja dan pelaporan kinerja yang disusun Sesuai standar	100	12.000.000	
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	8.933.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	2.000.000	
2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan Laporan)	6	27.694.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan Laporan)	6	10.000.000	
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPSDM-Tembilahan	Perangkat Daerah Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	100	5.064.918.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPSDM-Tembilahan	Perangkat Daerah Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	100	4.612.018.100	

1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji Tunjangan ASN (Dengan Satuan Orang/Bulan)	40	5.064.918.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji Tunjangan ASN (Dengan Satuan Orang/Bulan)	45	4.612.018.100	
III	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKPSDM-Tembilahan	Persentase ASN yang mengikuti Sosialisasi dalam rangka Pengembangan Kompetensi (Dengan Satuan:Persen)	100	174.318.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKPSDM-Tembilahan	Persentase ASN yang mengikuti Sosialisasi dalam rangka Pengembangan Kompetensi (Dengan Satuan:Persen)	100	20.000.000	
1	Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Dengan Satuan:Laporan)	2	99.209.000	Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Dengan Satuan:Laporan)	2	20.000.000	
2	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	100	75.109.000	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	100	-	
IV	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPSDM-Tembilahan	Persentase Sarana Prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Persen)	100	848.381.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPSDM-Tembilahan	Persentase Sarana Prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Persen)	100	527.272.700	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	7.444.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	2.004.000	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	199.566.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	135.429.200	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	42.629.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	68.720.000	

4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	6	23.748.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	15.311.500	
5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	11.166.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	4	-	
6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	563.828.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	305.808.000	
V	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPSDM-Tembilahan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	22.333.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPSDM-Tembilahan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	-	
1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	22.333.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	-	
VI	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM-Tembilahan	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional Kantor (Dengan Satuan:Persen)	100	109.952.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM-Tembilahan	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional Kantor (Dengan Satuan:Persen)	100	118.877.500	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	2	3.252.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	4	2.000.000	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	2	77.129.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	100.950.000	

3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	2	29.571.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	15.927.500	
VII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM-Tembilahan	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik (Dengan Satuan:Persen)	100	266.943.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM-Tembilahan	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik (Dengan Satuan:Persen)	100	743.619.600	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	35	99.733.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	38	54.700.000	
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	35	18.314.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	35	12.000.000	
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	148.896.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	676.919.600	
B	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM-Tembilahan	Indeks Manajemen ASN (Dengan Satuan : Persen)	70	3.809.667.000	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM-Tembilahan	Indeks Manajemen ASN (Dengan Satuan : Persen)	70	605.260.000	
VIII	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPSDM-Tembilahan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN yang diangkat melalui Seleksi Pengadaan ASN (Dengan Satuan:Persen)	100	1.303.601.000	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPSDM-Tembilahan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN yang diangkat melalui Seleksi Pengadaan ASN (Dengan Satuan:Persen)	100	179.000.000	

1	Sub Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN (Dengan Satuan:Laporan)	2	800.403.000	Sub Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN (Dengan Satuan:Laporan)	1	150.000.000	
2	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dengan Satuan:Dokumen)	2	92.628.000	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dengan Satuan:Dokumen)	175	9.000.000	
3	Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Dengan Satuan:Lembaga)	1	137.403.000	Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Dengan Satuan:Lembaga)	2	20.000.000	
4	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	2	71.573.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	6	-	
5	Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Laporan)	2	201.594.000	Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Laporan)	3	-	
IX	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	BKPSDM-Tembilahan	Persentase aparatur yang menjabat sesuai dengan syarat kompetensi jabatannya (Dengan Satuan:Persen)	80	313.932.000	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	BKPSDM-Tembilahan	Persentase aparatur yang menjabat sesuai dengan syarat kompetensi jabatannya (Dengan Satuan:Persen)	80	74.000.000	
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	187.371.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	45.000.000	
2	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	6	126.561.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	12	29.000.000	

X	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	BKPSDM-Tembilahan	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Kopetensi ASN (Dengan Satuan:Person)	48	1.502.535.000	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	BKPSDM-Tembilahan	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Kopetensi ASN (Dengan Satuan:Person)	48	337.260.000	
1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	110	1.024.871.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	78	336.260.000	
2	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Dengan Satuan:Orang)	100	477.664.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Dengan Satuan:Orang)	2	1.000.000	
XI	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM-Tembilahan	Persentase ASN yang memiliki Kinerja Baik (Dengan Satuan:Person)	100	689.599.000	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM-Tembilahan	Persentase ASN yang memiliki Kinerja Baik (Dengan Satuan:Person)	100	15.000.000	
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dengan Satuan:Dokumen)	2	263.244.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dengan Satuan:Dokumen)	3	4.000.000	
2	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Dengan Satuan:Orang)	210	222.841.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Dengan Satuan:Orang)	270	3.000.000	
3	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Dengan Satuan:Laporan)	3	203.514.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Dengan Satuan:Laporan)	1	8.000.000	
C	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPSDM-Tembilahan	Indeks Pengembangan Kompetensi ASN (Dengan Satuan:Person)	55,6	1.018.665.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPSDM-Tembilahan	Indeks Pengembangan Kompetensi ASN (Dengan Satuan:Person)	55,6	1.168.870.000	
XII	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	BKPSDM-Tembilahan	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Dengan Satuan:Person)	80	367.773.000	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	BKPSDM-Tembilahan	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Dengan Satuan:Person)	80	144.450.000	

1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Dengan Satuan:Orang)	12	367.773.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Dengan Satuan:Orang)	10	144.450.000	
XIII	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BKPSDM-Tembilahan	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Dengan Satuan:Person)	40	650.892.000	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BKPSDM-Tembilahan	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Dengan Satuan:Person)	40	1.024.420.000	
1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Dengan Satuan:Laporan)	2	650.892.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM-Tembilahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Dengan Satuan:Laporan)	2	1.024.420.000	
Jumlah					11.351.804.000	Jumlah					7.807.917.900

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada subbab ini disajikan hasil penelaahan terhadap berbagai usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan. Usulan tersebut berasal dari kelompok masyarakat yang berhubungan langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, perguruan tinggi, maupun perangkat daerah lain yang menyampaikan aspirasi melalui mekanisme musrenbang atau kanal aspirasi lainnya. Penelaahan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap usulan dievaluasi secara objektif, relevan dengan prioritas pembangunan daerah, serta selaras dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penelaahan dilakukan melalui kompilasi hasil musrenbang, pengumpulan masukan dari stakeholder, serta observasi lapangan. Selanjutnya, usulan tersebut dianalisis kesesuaiannya dengan isu-isu strategis dan kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah, sehingga dapat dipetakan program/kegiatan mana yang layak diakomodir, ditunda, atau diarahkan untuk ditangani oleh instansi lain yang lebih berwenang.

Tabel berikut memuat daftar usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan yang telah melalui proses penelaahan. Informasi dalam tabel disusun untuk memberikan gambaran mengenai jenis usulan, lokasi kegiatan, indikator kinerja yang relevan, besaran/volume kebutuhan, serta catatan penting yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Catatan tersebut dapat berupa tingkat urgensi, kesesuaian dengan prioritas daerah, ketersediaan anggaran, ataupun rekomendasi tindak lanjut.

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Indragiri Hilir

Badan Kepegawaian dan Pengembanagn Sumber Daya Manusia
Kabupaten Indragiri Hilir

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan - Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		N I H I L			

‘BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Subbab ini menjelaskan hasil penelaahan terhadap kebijakan nasional yang relevan dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir.

Telaahan terhadap kebijakan nasional ini dimaksudkan sebagai penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah di tahun perencanaan telah mendukung dan selaras dengan agenda strategis nasional dan program prioritas Pemerintah Pusat. Hasil telaahan ini menjadi dasar untuk menyesuaikan fokus program Perangkat Daerah agar terjadi sinkronisasi dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.

3.1.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional

Sebagai acuan utama, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir telah menelaah Prioritas Nasional (PN) yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2026. Kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2026 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 diarahkan untuk mendukung tema dan kebijakan RPJMN Tahun 2025 – 2029. Dimana arah kebijakan RPJMN teknokratik tahun 2025 – 2029 diarahkan pada Penguatan Fondasi Transformasi., dengan prioritas nasional tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Prioritas dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2026

NO	ASTACITA	ARAH KEBIJAKAN 2026
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Penyelenggaraan manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar
		Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah
		Peningkatan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila
		Penguatan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila

NO	ASTACITA	ARAH KEBIJAKAN 2026
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pengelolaan hutan lestari sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan, air dan energi
		Penguatan pencapaian Ketahanan Energi
		Penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang
		Peningkatan ketahanan pangan
		Penguatan Lingkungan Hidup yang Berkualitas
		Penguatan keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah
		Pemenuhan Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan
3.	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Peningkatan Produksi Pertanian
		Pemenuhan pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah
		Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
		Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM
		Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)
4.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional
		Pemenuhan Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan
		Pemenuhan Kesehatan Untuk Semua
		Percepatan Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi
		Peningkatan kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja
		Peningkatan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak
		Peningkatan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital
		Penguatan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)
		Peningkatan kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga
5.	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat
		Peningkatan Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global

NO	ASTACITA	ARAH KEBIJAKAN 2026
		Percepatan pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas
		Peningkatan ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air
		Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
		Pemenuhan Target realisasi Penanaman Modal
6.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pemenuhan rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan
		Percepatan Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi
		Peningkatan kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa
		Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi
7.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah
		Penguatan kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
		Penguatan keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah
		Peningkatan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila
8.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	Penyelenggaraan manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar
		Penguatan Lingkungan Hidup yang Berkualitas
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa
		Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)
		Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat
		Penguatan Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa
		Peningkatan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila

3.1.2 Keterkaitan Prioritas Nasional dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Prioritas Nasional tersebut, dan selaras dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir yang berfokus pada Bidang Kepegawaian agar Terwujudnya Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Profesional, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir memastikan bahwa program dan kegiatan yang diusulkan akan difokuskan untuk mendukung dan mempercepat pencapaian Prioritas Nasional yang relevan sebagai berikut :

“Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan dengan Arah kebijakan Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah”.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Subbab ini menetapkan Tujuan dan Sasaran yang harus dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2026. Perumusan ini bersifat hierarkis dan fungsional, diturunkan dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah periode 2025-2029, yang sebelumnya telah diselaraskan dengan hasil analisis isu strategis di Bab II.

Slain itu, Tujuan dan Sasaran tahunan ini telah disinkronkan dan diperkuat oleh Tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026. Keterkaitan ini menjamin bahwa semua upaya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir akan terarah pada pencapaian sasaran makro daerah yang disepakati, termasuk mengatasi isu-isu strategis lokal dan mendukung Prioritas Nasional yang relevan

Berikut disajikan matriks Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah untuk Tahun 2026, yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja dan Target Capaian Kinerja.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja Awal Tahun Perencanaan (2024)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Renja Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN (PNS)	Indeks	79,59	79,90
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Manajemen Karier dan Administrasi Kepegawaian yang Terintegrasi	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi Pendidikan	Indeks	20,68	20,72
	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	29,36	29,75
	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja	Indeks	24,56	24,65
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang Berorientasi pada Hasil	Nilai AKIP Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Nilai	70,60	71,00

3.3 Program dan Kegiatan

Subbab ini menyajikan penjelasan naratif mengenai Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun Anggaran 2026. Perumusan ini merupakan tindak lanjut operasional yang wajib menjamin tercapainya Sasaran Perangkat Daerah dan memanfaatkan alokasi sumber daya secara efektif.

Dalam merumuskan rencana program dan kegiatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempertimbangkan faktor-faktor strategis berikut:

- 1) Program yang dipilih wajib mendukung pencapaian Prioritas Nasional, visi dan misi kepala daerah serta sasaran yang tertuang dalam RKPD.
- 2) Program diarahkan untuk mendayagunakan potensi ekonomi daerah dan mengatasi ketertinggalan
- 3) Penekanan khusus diberikan pada program yang memastikan pencapaian SDGs dan NSPK yang menjadi kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
- 4) Program difokuskan pada upaya mengatasi Isu-isu Penting yang timbul dari evaluasi kinerja tahun lalu



Pada Tahun Anggaran 2026, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir merencanakan pelaksanaan 3 Program yang terurai menjadi 13 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan yang tersebar di beberapa Kawan di Kabupaten Indragiri Hilir dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang diperlukan untuk seluruh rencana kerja adalah sebesar Rp. 7.807.917.900. Kebutuhan ini dirinci lebih lanjut menurut sumber pendanaannya (APBD Murni, DAK, dll.)

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Terwujudnya Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Profesional									
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang Berorientasi pada Hasil								
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	Tembilahan	100	Rp 6.033.787.900	Dana Alokasi Umum		100	Rp 7.162.219.952
5.03.01.2.01	1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja dan pelaporan kinerja yang disusun Sesuai standar	Tembilahan	100	Rp 12.000.000	Dana Alokasi Umum		100	Rp 23.700.000
5.03.01.2.01.01		1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	Tembilahan	5	Rp 2.000.000	Dana Alokasi Umum		5	Rp 3.400.000
5.03.01.2.01.07		1.1.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	Tembilahan	6	Rp 10.000.000	Dana Alokasi Umum		6	Rp 20.300.000
5.03.01.2.02	2.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	Tembilahan	100	Rp 4.612.018.100	Dana Alokasi Umum		100	Rp 4.731.019.952
5.03.01.2.02.01		2.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji Tunjangan ASN (Dengan Satuan Orang/Bulan)	Tembilahan	45	Rp 4.612.018.100	Dana Alokasi Umum		45	Rp 4.731.019.952
5.03.01.2.05	3.1	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti Sosialisasi dalam rangka Pengembangan Kompetensi (Dengan Satuan:Persen)	Tembilahan	100	Rp 20.000.000	Dana Alokasi Umum		100	Rp 119.800.000

5.03.01.2.05.07		3.1.1	Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Dengan Satuan:Laporan)	Tembilahan	2	Rp	20.000.000	Dana Alokasi Umum		2	Rp	99.500.000
5.03.01.2.05.10		3.1.2	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	Tembilahan	0	Rp	-	Dana Alokasi Umum		100	Rp	20.300.000
5.03.01.2.06	4.1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Persen)	Tembilahan	100	Rp	527.272.700	Dana Alokasi Umum		100	Rp	1.865.000.000
5.03.01.2.06.01		4.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Tembilahan	1	Rp	2.004.000	Dana Alokasi Umum		1	Rp	3.000.000
5.03.01.2.06.02		4.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Tembilahan	12	Rp	135.429.200	Dana Alokasi Umum		12	Rp	150.000.000
5.03.01.2.06.04		4.1.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Tembilahan	12	Rp	68.720.000	Dana Alokasi Umum		12	Rp	127.000.000
5.03.01.2.06.05		4.1.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Tembilahan	12	Rp	15.311.500	Dana Alokasi Umum		12	Rp	26.000.000
5.03.01.2.06.06		4.1.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	Tembilahan	0	Rp	-	Dana Alokasi Umum		0	Rp	10.000.000
5.03.01.2.06.09		4.1.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	Tembilahan	12	Rp	305.808.000	Dana Alokasi Umum		12	Rp	1.549.000.000
5.03.01.2.07	5.1	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	Tembilahan	0	Rp	-	Dana Alokasi Umum		100	Rp	35.500.000

5.03.01.2.07.02		5.1.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Tembilahan	0	Rp	-	Dana Alokasi Umum	1	Rp	35.500.000
5.03.01.2.08	6.1		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional Kantor (Dengan Satuan:Persen)	Tembilahan	100	Rp	118.877.500	Dana Alokasi Umum	100	Rp	138.200.000
5.03.01.2.08.01		6.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	Tembilahan	4	Rp	2.000.000	Dana Alokasi Umum	4	Rp	3.700.000
5.03.01.2.08.02		6.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Tembilahan	12	Rp	100.950.000	Dana Alokasi Umum	12	Rp	109.500.000
5.03.01.2.08.04		6.1.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Tembilahan	12	Rp	15.927.500	Dana Alokasi Umum	12	Rp	25.000.000
5.03.01.2.09	7.1		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik (Dengan Satuan:Persen)	Tembilahan	100	Rp	743.619.600	Dana Alokasi Umum	100	Rp	249.000.000
5.03.01.2.09.02		7.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Tembilahan	38	Rp	54.700.000	Dana Alokasi Umum	38	Rp	135.000.000
5.03.01.2.09.06		7.1.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	Tembilahan	35	Rp	12.000.000	Dana Alokasi Umum	35	Rp	14.000.000
5.03.01.2.09.09		7.1.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	Tembilahan	1	Rp	676.919.600	Dana Alokasi Umum	1	Rp	100.000.000
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Manajemen Karier dan Administrasi Kepegawaian yang Terintegrasi									
5.03.02.2.01	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			Indeks Manajemen ASN (Dengan Satuan : Persen)	Tembilahan	70	Rp	605.260.000	Dana Alokasi Umum	75	Rp	4.182.691.824
5.03.02.2.01.04	1.1		Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN yang diangkat melalui Seleksi Pengadaan ASN (Dengan Satuan:Persen)	Tembilahan	100	Rp	179.000.000	Dana Alokasi Umum	100	Rp	1.857.691.824

5.03.02.2.01.06		1.1.1	Sub Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN (Dengan Satuan:Laporan)	Tembilahan	1	Rp	150.000.000	Dana Alokasi Umum		2	Rp	1.079.154.824
5.03.02.2.01.08		1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dengan Satuan:Dokumen)	Tembilahan	175	Rp	9.000.000	Dana Alokasi Umum		220	Rp	195.000.000
5.03.02.2.01.11		1.1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Dengan Satuan:Lembaga)	Tembilahan	2	Rp	20.000.000	Dana Alokasi Umum		2	Rp	234.000.000
5.03.02.2.01.12		1.1.4	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	Tembilahan	0	Rp	-	Dana Alokasi Umum		6	Rp	153.141.000
5.03.02.2.02		1.1.5	Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Laporan)	Tembilahan	0	Rp	-	Dana Alokasi Umum		3	Rp	196.396.000
5.03.02.2.02.01	2.1	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN		Persentase aparatur yang menjabat sesuai dengan syarat kompetensi jabatannya (Dengan Satuan:Persen)	Tembilahan	80	Rp	74.000.000	Dana Alokasi Umum		80	Rp	357.588.000
5.03.02.2.02.02		2.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	Tembilahan	2	Rp	45.000.000	Dana Alokasi Umum		2	Rp	145.145.000
5.03.02.2.03		2.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	Tembilahan	12	Rp	29.000.000	Dana Alokasi Umum		12	Rp	212.443.000
5.03.02.2.03.01	3.1	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Kopetensi ASN (Dengan Satuan:Persen)	Tembilahan	48	Rp	337.260.000	Dana Alokasi Umum		48	Rp	1.612.412.000
5.03.02.2.03.04		3.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	Tembilahan	78	Rp	336.260.000	Dana Alokasi Umum		185	Rp	1.242.412.000
5.03.02.2.04		3.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Dengan Satuan:Orang)	Tembilahan	2	Rp	1.000.000	Dana Alokasi Umum		12	Rp	370.000.000
5.03.02.2.04.02	4.1	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase ASN yang memiliki Kinerja Baik (Dengan Satuan:Persen)	Tembilahan	100	Rp	15.000.000	Dana Alokasi Umum		100	Rp	355.000.000

5.03.02.2.04.02		4.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dengan Satuan:Dokumen)	Tembilahan	3	Rp	4.000.000	Dana Alokasi Umum		3	Rp	105.000.000
5.03.02.2.04.04		4.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Dengan Satuan:Orang)	Tembilahan	270	Rp	3.000.000	Dana Alokasi Umum		280	Rp	150.000.000
5.03.02.2.04.08		4.1.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Dengan Satuan:Laporan)	Tembilahan	1	Rp	8.000.000	Dana Alokasi Umum		1	Rp	100.000.000
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			Indeks Pengembangan Kompetensi ASN (Dengan Satuan:Persen)	Tembilahan	55,6	Rp	1.168.870.000	Dana Alokasi Umum		55,7	Rp	1.118.407.926
5.04.02.2.01	1.1	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Dengan Satuan:Persen)	Tembilahan	80	Rp	144.450.000	APB Dana Alokasi Umum D		80	Rp	200.000.000
5.04.02.2.01.03		1.1.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Dengan Satuan:Orang)	Tembilahan	10	Rp	144.450.000	Dana Alokasi Umum		10	Rp	200.000.000
5.04.02.2.02	2.1	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Dengan Satuan:Persen)	Tembilahan	40	Rp	1.024.420.000	Dana Alokasi Umum		40	Rp	918.407.926
5.04.02.2.02.07		2.1.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Dengan Satuan:Laporan)	Tembilahan	2	Rp	1.024.420.000	Dana Alokasi Umum		3	Rp	918.407.926
TOTAL							Rp	7.807.917.900				Rp	12.463.319.702

BAB IV

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KAB. INDRAGIRI HILIR TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA						7.807.917.900,00							12.463.319.702,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						7.807.917.900,00							12.463.319.702,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						6.639.047.900,00							11.344.911.776,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.033.787.900,00						-	7.162.219.952,00	
		[Terpenuhihnya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran]	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	6.033.787.900,00	-	-	-	-	-	-	7.162.219.952,00	-
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja dan pelaporan kinerja yang disusun Sesuai standar	-			100 persen	12.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil	-	23.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil		3.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	10.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan -	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil		20.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	-			100 persen	4.612.018.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan -	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil	-	4.731.019.952,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	4.612.018.100,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan -	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil		4.731.019.952,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti Sosialisasi dalam rangka Pengembangan Kompetensi (Dengan Satuan:Persen)	-			100 persen	20.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan -	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil	-	119.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas														
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				2 Laporan	20.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil		99.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil		20.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Persen)	-			100 persen	527.272.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil	-	1.865.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.004.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil		3.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	135.429.200,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	68.720.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil		127.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	15.311.500,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil		26.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	305.808.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil		1.549.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	-			100 persen	0.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil	-	35.500.000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0.00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil		35.500.000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	-			100 persen	118.877.500.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil	-	138.200.000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan -	TRANSFO RMASI TATA KELOLA Meningkatn ya tata kelola pem erintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil		3.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	100.950.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan -	TRANSFO RMASI TATA KELOLA Meningkatn ya tata kelola pem erintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil		109.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	15.927.500,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan -	TRANSFO RMASI TATA KELOLA Meningkatn ya tata kelola pem erintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik (Dengan Satuan:Persen)	-			100 persen	743.619.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil	-	249.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				38 Unit	54.700.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil		135.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	12.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Temblahan, Temblahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil		14.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	676.919.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan asan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan ya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						605.260.000,00						-	4.182.691.824,00	
		[Meningkatnya Tata Kelola Manajemen ASN]	Indeks Manajemen ASN	90	60	65	70	605.260.000,00	-	-	-	-	-	-	4.182.691.824,00	-
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN yang diangkat melalui Seleksi Pengadaan ASN (Dengan Satuan:Persen)	-			100 persen	179.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan asan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan ya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil	-	1.857.691.824,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan asan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan ya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil		1.079.154.824,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				175 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil		195.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				2 Lembaga	20.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil		234.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				6 Dokumen	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil		153.141.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawain				3 Laporan	0.00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kei/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	TRANSFO RMA SI TATA KELOLA Meningkatn ya tata kelola pem erintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil		196.396.000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase aparatur yang menjabat sesuai dengan syarat kompetensi jabatannya (Dengan Satuan.Persen)	-			80 persen	74.000.000.00			Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	TRANSFO RMA SI TATA KELOLA Meningkatn ya tata kelola pem erintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil	-	357.588.000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				2 Dokumen	45.000.000.00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	TRANSFO RMA SI TATA KELOLA Meningkatn ya tata kelola pem erintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil		145.145.000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				12 Dokumen	29.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik.	ASN Pemkab. Inhil		212.443.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN (Dengan Satuan/Persen)	-			48 persen	337.260.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik.	ASN Pemkab. Inhil	-	1.612.412.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0001		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														
			Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				78 Orang	336.260.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik.	ASN Pemkab. Inhil		1.242.412.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0004		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				2 Orang	1.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil		370.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang memiliki Kinerja Baik (Dengan Satuan:Person)	-			100 persen	15.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil	-	355.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0002		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				3 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil		105.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0004		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				270 Orang	3.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						1.168.870.000,00							1.118.407.926,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						1.168.870.000,00						-	1.118.407.926,00	
		[Meningkatkan Kompetensi ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional]	Indeks Pengembangan Kompetensi ASN	56	55	55.5	55.6	1.168.870.000,00	-	-	-	-	-	-	1.118.407.926,00	-
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Dengan Satuan/Persen)	-			80 persen	144.450.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil	-	200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				10 Orang	144.450.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Dengan Satuan:Persen)	-			40 persen	1.024.420.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil	-	918.407.926,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
5.04.02.2.02.0007		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan															
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				2 Laporan	1.024.420.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan berbasis elektronik	ASN Pemkab. Inhil		918.407.926,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
		JUMLAH						7.807.917.900,00								12.463.319.702,00	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja-PD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 merupakan puncak dari tahapan perencanaan pembangunan tahunan di Kabupaten Indragiri Hilir. Dokumen ini telah mengakomodir hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, mempertimbangkan permasalahan dan isu-isu strategis, serta menyelaraskan program pembangunan dengan rencana kerja Pemerintah dan Pemerintah RKPD Indragiri Hilir Tahun 2026.

Selanjutnya, Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan, beserta target dan kebutuhan pendanaan, yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan instrumen pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

5.1 Catatan Penting

Terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian serius selama proses pelaksanaan Renja ini:

- a) Pelaksanaan program/ kegiatan dan sub kegiatan wajib difokuskan pada pencapaian Sasaran Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan pada Bab III. Program yang memiliki kontribusi terbesar terhadap capaian SPM dan pengentasan Isu-isu Penting (Bab II) harus diutamakan dalam realisasi anggaran.
- b) Apabila ketersediaan anggaran yang dialokasikan dalam APBD tidak sesuai dengan kebutuhan ideal (Pagu Indikatif) yang tercantum dalam Renja, maka pelaksanaan program/ kegiatan dan sub kegiatan akan disesuaikan secara proporsional. Penyesuaian wajib memperhatikan KUA dan PPAS, dengan tetap mempertahankan program yang mendukung pemenuhan SPM sebagai prioritas utama.
- c) Pelaksanaan program/ kegiatan dan sub harus responsif terhadap perubahan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah yang mungkin terjadi setelah Renja ini ditetapkan.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir berpedoman pada kaidah-kaidah berikut untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas:

a) Konsistensi

Pelaksanaan wajib konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, dan RKP (Pusat), serta mengacu pada Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS Tahun 2026.

b) Transparan dan Akuntabel

Setiap alokasi anggaran dan realisasi program wajib dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Efisiensi dan Efektivitas

Pendekatan penganggaran berbasis kinerja harus diterapkan untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal dan memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian target kinerja.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Setelah penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah:

a) Renja ini akan menjadi pedoman utama bagi seluruh Bidang/Unit Kerja dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2026

b) Dokumen ini akan digunakan sebagai dasar bagi proses pengendalian, pelaporan, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, baik secara triwulanan maupun tahunan.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir berkomitmen untuk melaksanakan seluruh rencana kerja yang telah disepakati demi keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Indragiri Hilir,

Agustia Nugroho, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 198108142011021001